

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA KWEDENKEMBAR

Heru Irianto¹, Bagus Ananda Kurniawan², Dirga Bayu Wardana³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas bhayangkara Surabaya

e-mail: heru@ubhara.ac.id¹ bagus@ubhara.ac.id² dirgabayuwardana@gmail.com³

Abstrak

implementasi kebijakan dana desa dalam pengembangan desa wisata. Kebijakan dana desa, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di pedesaan, memberikan dana langsung kepada pemerintah desa untuk digunakan dalam berbagai program pembangunan bahwa dana desa memiliki peran signifikan dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata di desa. Dana desa digunakan untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas akomodasi, dan objek wisata baru yang menarik wisatawan. Selain itu, program pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata juga mendapatkan dukungan dari dana desa. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan ini, antara lain kurangnya koordinasi antar pihak terkait, keterbatasan kemampuan manajerial aparat desa

Kata kunci: Dana Desa, Pengembangan Desa Wisata, Kebijakan, Implementasi, Pariwisata Pedesaan

Abstract

implementation of village fund policies in developing tourist villages. The village fund policy, which is part of the Indonesian government's efforts to accelerate development in rural areas, provides funds directly to village governments to be used in various development programs, that village funds have a significant role in developing infrastructure and tourism supporting facilities in villages. Village funds are used to build roads, bridges, accommodation facilities and new tourist attractions that attract tourists. Apart from that, training programs and increasing human resource capacity in the tourism sector also receive support from village funds. However, there are several challenges in implementing this policy

Keywords: Village Funds, Tourism Village Development, Policy, Implementation, Rural Tourism.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sabang sampai Merauke, dimana sebagian penduduk hidup di pedesaan, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI., Titik sentral pembangunan yang dilakukan pemerintah dimulai dari daerah pedesaan, dengan harapan mengurangi kesenjangan sosial yang dimana dapat diwujudkan sebagai suatu langkah pemerintahan mengatasi daerah tertinggal dengan melakukan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di desa, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan Indonesia terdiri dari beberapa provinsi yang terdiri dari kabupaten kota, sedangkan daerah kabupaten kota terbagi lagi atas desa dan kelurahan yang merupakan satuan pemerintahan dengan lingkup kecil.

Berdasarkan PP No. 60/2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dana tersebut dialokasikan untuk desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa.

Dana tersebut bertujuan untuk memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, dana desa yang lebih besar dari APBN 2022 dialokasikan untuk memperkuat pembangunan desa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana desa untuk tujuan tersebut tahun 2023 sejumlah Rp 70 triliun. Dana desa tahun 2023 disalurkan dari rekening kas umum ke rekening kas daerah penerima dana di 434 kabupaten/kota, dengan syarat daerah tersebut telah menyampaikan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara penghitungan dan penataan rincian dana desa kepada Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dana tersebut ditransfer ke 74.000 desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, dengan syarat desa telah menetapkan APBDes dan menyampaikannya kepada pemerintah kabupaten/kota, yang kemudian menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Proses ini diatur oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian yang relevan.

METODE

Pendekatan pada penelitian ini lebih mengarah pada pendekatan kuantitatif sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Metode penelitian secara umum dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan guna tertentu, Metode penelitian mencakup beberapa hal yang masing-masing menentukan keberhasilan pelaksanaan penelitian guna menjawab permasalahan yang di sampaikan dalam penelitian Langkah yang diterapkan adalah penetapan tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, Penetapan objek penelitian, Penetapan metode pengumpulan data dan Teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan melakukan penyajian data sebagai hasil yang telah di peroleh di lingkungan peneliti di sertai dengan analisis sebagai upaya menjawab rumusan masalah yang di ajukan tentang implementasi alokasi dana desa dalam penegmbangan desa wisata. Penyajian data di sini bertujuan untuk menampilkan informasi yang diperoleh selama penelitian di lingkungan yang dianggap relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data yang di sajikan itu di peroleh melalui penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data, baik melalui teknik wawancara maupun dokumentasi, selanjutnya akan di lakukan pemaparan mengenai hasil pengimpulan data yang telah di lakukan dalam rangka menjawab perumusan masalah yang telah di kemukakan sebelumnya.

implementasi kebijakan dana desa dalam pengebangan desa wisata

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparans, dan akuntabilitas dan tepat sasaran dalam pengembangan desa wisata pemerintah desa Kwedenkembar, bapak buyanti selaku kepala desa memanggil dan memberikan arahan untuk program pengembangan desa wisata ke setiap kepala dusun yang ada di desa kwedenkmar untuk melakukan musyawarah dusun dengan harapan melakuakan musyawarah tingkat dusun (musdus) dapat mendengar aspirasi atau kebutuhan masyarakat dusun dalam pengembangan desa wisata secara maksimal setelah melakukan musawarah dusun aparat desa melakukan musyawarah tingkat desa.

Dalam musyawarah tingkat desa (Musrengbangdes) para kepala dusun menyampikan hasil dari musyawarah dusun yang akan di bahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa dari musawarah tingkat dusun dapat jadikan patokan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dari hasil musyawarah dusun (MUSDUS) dalam pengembangan desa wisata yang di selenggarakan di kelurahan atau kantor kepala desa Kwedenkembar. Dalam musyawarah pembangunan tingkat desa (musrengbangdes) kepala desa kwedenkmar juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat desa bahwa desa Kwedenkembar sendiri telah berkerja sama dengan salah satu unversitas di sidoarjo (UMSIDA).

etelah melakukan musyawarah pembanguana desa (MUSRENGBANGDES) aparat desa menyampaikan hasil dari musyawarah tersebut ke pada pihak kecamatan mojoanyar yang nantinya akan di sampaikan lagi kepada PEMKOT Mojokerto.

1) Musyawarah Dusun (MUSDUS)

Musyawarah dusun merupakan kegiatan yang di lakukan pemerintah desa Kwedenkambar sebelum melaksanakan kebijakan dana desa dalam hal membangun desa wisata. Musyawarah dusun di hadiri oleh seluruh masyarakat dan aparat dengan tujuan menyaring aspirasi masyarakat tentang pembangunan yang di butuhkan saat ini

2) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

Musyawarah pembangunan rencana desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang di hadiri oleh masyarakat, dan petugas kecamatan yang bertujuan untuk membicarakan Kembali hasil dari musyawarah dusun tentang pembangunan desa wisata yang di butuhkan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa interaksi dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Kwedenkambar, terutama dalam pengembangan desa wisata, sangat tinggi. Pemerintah Desa Kwedenkambar berupaya agar pelaksanaan kebijakan dana desa berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Kwedenkambar akan memilih setiap sasaran dan masukan yang akan di ajukan dari masyarakat desa ke Pemerintah Desa Kwedenkambar.

Musyawarah dusun di Desa Kwedenkambar ini dapat di jadikan wadah untuk menyampaikan ide, gagasan, dan aspirasi masyarakat dusun dalam mengidentifikasi potensi yang berada di dusun mereka lebih maksimal dan lebih evisien. Serta dapat merumuskan strategi yang tepat dan rencana dalam pengembangan desa wisata. masyarakat dusun juga dapat membangun kesepakatan dan komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan di dusun, termasuk pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama mendukung pengembangan desa wisata. Musdus mendorong partisipasi aktif masyarakat dusun dalam proses pengembangan desa wisata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa desa wisata dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dusun. Manfaat dari musyawarah dusun dalam pengembangan desa wisata antara lain dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat dengan terlibat dalam Musdus, masyarakat dusun merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengembangan desa wisata di dusun mereka. Dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Musdus menjadi sarana untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dusun dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mengembangkan desa wisata yang sukses dan berkelanjutan. Setelah melakukan musyawarah dusun, kepala dusun memberikan hasil ke pada kepala desa.

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
BLT(Bantuan Langsung Tunai)	794.427.000	79.442.700	10%
Ketahanan Pangan	794.427.000	158.885.400	20%
Oprasional pemdes	794.427.000	23.832.900	3%
Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	794.427.000	532.265.000	67%

Dana desa yang diterima oleh pemerintah desa kwedenkambar sebesar 794.427.000 yang di alokasiakan ke beberapa program desa juga di manfaatakan untuk oprasional desa antara lain. Bantuan langsung tunai, ketahanan pangan, pembangunan dan pemberdayaan masyarkat desa.

Untuk bantuan langsung tunai pemerintah desa mengalokasiakan dana desa sebesar 10% dengan total anggaran sebersar 79.442.700 yang di salurkan oleh langsung kepada masyarakat yang terdampak situasi darurat dan warga yang membutuhkan. Untuk ketahanan pangan pemerintah desa kwedenkambar merealisasikan anggaran sebesar 158.885.00 yang di ambikan dari dana desa sebesar 20%. Dana desa untuk ketahan pangan di gunakan untuk berbagai program yang mendukung keberlanjutan produksi pangan di desa seperti, penyediaan bibit tanaman dan pelatihan bagi para petani realisasi anggaran dari dana desa sebesar 20% menunjukan fokus desa memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat desa kwedenkambar terpenuhi dan mendukung kemandirian pangan lokal. Dan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarkat desa kwedenkambar mengalokasiakan dana desanya sebesar 532.265.000 program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mencakup berbagai proyek infrastuktur seperti pembangunan jembatan. Pembuatan irigasi. Pengadaan pembelian tempat sampah sebanyak 300. Realisasi sebesar 67% menunjukan bahwa

mayoritas dana desa di gunakan untuk proyek yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ini mencerminkan prioritas desa dalam pembanguna fisik dan sosial untuk mencapai lingkungan yang lebih baik dan memberdayakan warganya. Dana desa juga dimanfaatkan untuk operasional pemerintah desa dana yang di alokasiakan untuk kegiatan oprasional rutin pemerintah desa. Seperti pembayaran honor perangkat desa, biaya administrasi, operasional kantor desa, persentasi realisasi yang relatif kecil yang hanya 3 % saja mencerminkan bahwa dana biaya orpasioanal pemerintah desa di alokasikan secara efisien. Sehingga lebih banyak dana desa yang dapat di alokasikan untuk program-program yang lainnya yang dapat di rasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat desa kwedenkembar.

Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus didukung dengan dokumen dan indikator kinerja yang memadai, karena hal ini penting untuk membantu pemerintahan desa dalam mengukur efektivitasnya. Pada tahap ini, Bapak Buyani, Kepala Desa Kwedenkembar, menjelaskan bahwa informasi mengenai perencanaan pengelolaan keuangan dana desa sangat penting agar kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

“ Tujuan utama program pembangunan desa wisata di Desa Kwedenkembar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa kami memiliki banyak potensi wisata yang selama ini belum dioptimalkan. Dengan mengembangkan desa wisata, kami berharap dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan melestarikan budaya lokal.”

Hambatan dan dukungan dalam implementasi kebijakan dana desa dalam pengembangan desa wisata

Kebijakan Dana Desa di Indonesia diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk melalui pengembangan desa wisata. Desa wisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya lokal. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan.

Keterbatasan sumber daya

Banyak aparatur desa yang belum memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola Dana Desa secara efektif dan akuntabel, khususnya dalam konteks pengembangan desa wisata. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan dana, penyalahgunaan dana, dan kegagalan dalam mencapai tujuan program Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pengembangan desa wisata yang efektif dan berkelanjutan, bisa saja disalahgunakan atau digunakan secara tidak efisien karena kurangnya pemahaman aparatur desa tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan program.

“ banyak sekali hambatannya mas Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Di desa kami, masih banyak aparatur desa dan masyarakat yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengelola desa wisata.

Kedua, regulasi dan perizinan yang rumit, proses perizinan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata di desa sangat panjang dan berbelit-belit. Hal ini menghambat realisasi program pengembangan desa wisata.

Ketiga, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Belum ada koordinasi yang jelas antara pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha wisata, dan pihak terkait lainnya. Hal ini menyebabkan program pengembangan desa wisata tidak berjalan dengan efektif.

“ Dari hasil wawancara di atas dengan bapak Buyani selaku kades sangat menyayangkan masih banyak aparatur desa yang belum faham dalam pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata “

Aparatur desa yang tidak faham dapat menyebabkan ketidak optimalan tentang potensi dan kebutuhan masyarakat desa yang tidak memadai memungkinkan menggunakan dana desa secara tidak efisien atau tidak tepat sasaran. Tanpa pemberdayaan yang memadai, potensi kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata mungkin tidak tergalai sepenuhnya. Hal ini bisa menghambat kemampuan desa untuk berkembang dan bersaing dalam industri pariwisata. Pemberdayaan masyarakat penting untuk menciptakan keberlanjutan proyek-proyek pengembangan desa wisata. Tanpa keterlibatan aktif dan pemahaman masyarakat tentang manfaat jangka panjang proyek, implementasi proyek bisa gagal atau tidak berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat penting untuk menciptakan keberlanjutan proyek-proyek pengembangan desa wisata. Tanpa keterlibatan aktif dan pemahaman masyarakat tentang manfaat jangka panjang proyek, implementasi proyek bisa gagal atau tidak berkelanjutan. Ketidak tauhan aparatur desa dan kurangnya keterlibatan masyarakat juga

dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana desa. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana dan kurangnya pertanggung jawaban. Ketidaktahuan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat dapat membuat desa kesulitan dalam menangani masalah-masalah lokal yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata, seperti pengelolaan lingkungan, pemasaran produk lokal, atau pengembangan infrastruktur.

Dalam pelaksanaan implementasi dana desa di desa Kwedenkembar ini sering kali di hadapkan dengan berbagai macam hambatan yang terus bergulir permasalahan yang sering terjadi di desa Kwedenkembar seperti ketidak fahaman aparat desa dalam pemanfaatan dana desa yang dapat dialokasikan untuk proses pengembangan desa wisata internal desa dan kurangnya SDM seperti wawancara dengan pak Buyani selaku kepala desa Kwedenkembar

“desa kami memiliki potensi besar untuk pengembangan desa wisata. Namun, kami masih menghadapi beberapa kendala internal, seperti kurangnya SDM terlatih, kelemahan dalam pengelolaan keuangan, dan minimnya inovasi dalam pengembangan wisata.

Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam mengidentifikasi potensi desa

Dalam pengembangan wisata diperlukan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pengembangan desa wisata masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tentang tujuan, mekanisme, dan manfaat program Dana Desa Wisata. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif dari pemerintah desa dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahpahaman. Dalam pelaksanaan implementasi dana desa di desa kwedenkembar ini seringkali dihadapkan dengan berbagai macam hambatan yang terus bergulir permasalahan yang sering terjadi di desa Kwedenkembar seperti ketidak fahaman aparat desa dalam pemanfaatan dana desa yang dapat dialokasikan untuk proses pengembangan desa wisata, internal desa dan kurangnya SDM seperti wawancara dengan pak Buyani selaku kepala desa Kwedenkembar.

“desa kami memiliki potensi besar untuk pengembangan desa wisata. Namun, kami masih menghadapi beberapa kendala internal, seperti kurangnya SDM terlatih, kelemahan dalam pengelolaan keuangan, dan minimnya inovasi dalam pengembangan wisata.

Pemerintah daerah sangat berperan penting dalam membantu desa mengatasi hambatan-hambatan ini. Salah satu bentuk bantuannya adalah melalui pelatihan dan pendampingan. Pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada masyarakat desa tentang berbagai hal yang terkait dengan desa wisata, seperti pengelolaan homestay, pemandu wisata, dan pemasaran desa wisata. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan kepada desa dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan dana desa wisata.

Bentuk bantuan lain dari pemerintah daerah adalah fasilitasi akses informasi dan teknologi. Pemerintah daerah membantu desa dalam mengakses informasi tentang desa wisata terbaik, tren pariwisata terkini, dan teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan desa wisata. Selain itu, pemerintah daerah juga membantu desa dalam membangun website dan media sosial untuk promosi desa wisata.

Partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan pengembangan desa. Partisipasi masyarakat berperan dalam mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan program, partisipasi juga mencakup keterlibatan mereka dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada.

Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi desa dalam pengembangan wisata. Melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses informasi dan teknologi, pemerintah daerah membantu meningkatkan kapasitas lokal dan memastikan bahwa potensi desa wisata dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Upaya kolaboratif ini akan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi pembangunan ekonomi dan sosial desa, menjadikan desa wisata sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah.

Desa wisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian lokal dan memberdayakan masyarakat desa. Namun, pengembangan desa wisata seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan internal, seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) terlatih, kelemahan dalam pengelolaan keuangan, dan minimnya inovasi. Pemerintah daerah berperan penting dalam membantu desa mengatasi hambatan-hambatan ini melalui berbagai bentuk bantuan, termasuk pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses informasi dan teknologi. Pelatihan yang disediakan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat desa dalam berbagai aspek pengembangan desa wisata.

Pengelolaan Homestay Manajemen dan Operasional: Pelatihan ini mencakup pemeliharaan fasilitas, kebersihan, dan manajemen operasional sehari-hari untuk memastikan homestay berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman terbaik bagi tamu. Masyarakat diajarkan cara memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, memahami kebutuhan tamu, dan memenuhi standar hospitality nasional. Masyarakat juga diberikan pelatihan dalam pengolahan keuangan homestay, termasuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran serta penyusunan laporan keuangan sederhana.

Masyarakat juga di ajarkan keterampilan dalam berkomunikasi dengan para wisatawan dari masyarakat lokal maupaun wisatawan asing. Pemandu wisata diberikan informasi mendalam tentang sejarah, budaya, dan keunikan lokal yang bisa disampaikan kepada wisatawan untuk meningkatkan daya tarik wisata. Masyarakat diajarkan prosedur keamanan dan keselamatan untuk wisatawan, termasuk penanganan situasi darurat.

Pemasaran Desa Wisata Strategi Pemasaran Digital Pelatihan ini mencakup penggunaan media sosial, website, dan platform digital lainnya untuk mempromosikan desa wisata secara efektif. Diajarkan cara membangun dan memperkuat merek desa wisata, termasuk pembuatan logo, slogan, dan materi promosi visual. Masyarakat juga di berikan untuk membuat Event dan Festival Pelatihan ini meliputi perencanaan dan pengelolaan acara atau festival yang dapat menarik wisatawan.

Pendampingan oleh pemerintah daerah melibatkan bantuan teknis dan konsultasi untuk memastikan implementasi yang efektif dari program-program desa wisata. Bentuk pendampingan meliputi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Pemerintah daerah membantu desa dalam menyusun rencana pembangunan wisata yang berkelanjutan, termasuk identifikasi potensi wisata dan prioritas pengembangan. Pemetaan Sumber Daya Masyarakat dibantu dalam pemetaan sumber daya alam dan budaya yang bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata serta merancang strategi pemanfaatan Perencanaan Anggaran Pendampingan dalam menyusun anggaran untuk proyek pengembangan wisata, memastikan alokasi dana yang tepat dan efisien. Proses monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa wisata dilakukan untuk memastikan pencatatan dan pelaporan keuangan yang transparan.

Pemerintah desa juga melakukan pendampingan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan dana desa, terutama dalam konteks pengembangan desa wisata. Berikut adalah beberapa peran kunci yang dimainkan oleh pemerintah daerah.

Penyediaan Infrastruktur Dasar Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas sanitasi tersedia dan memadai. Infrastruktur yang baik akan mendukung aksesibilitas wisatawan ke desa wisata dan memperlancar arus barang dan jasa. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Melalui berbagai program pelatihan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam mengelola dana desa serta mengembangkan potensi wisata yang ada. Ini termasuk pelatihan dalam bidang perencanaan pariwisata, manajemen keuangan, dan pemasaran.

Termasuk Pendampingan Teknis Pemerintah daerah juga menyediakan pendampingan teknis bagi desa-desa yang mengalami kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pengembangan wisata. Pendampingan ini bisa berupa bantuan dalam penyusunan rencana strategis, studi kelayakan, dan pengelolaan proyek. Kolaborasi dengan Stakeholder lain Pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara desa dengan berbagai stakeholder lain, seperti investor, lembaga non-pemerintah, dan instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memperoleh dukungan tambahan, baik dalam bentuk pendanaan, promosi, maupun keahlian.

SIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Kwedenkembar menunjukkan partisipasi aktif dan komitmen tinggi dari masyarakat dan pemerintah desa. Proses musyawarah di tingkat dusun dan desa menjadi mekanisme utama untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa pengembangan desa wisata berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) juga memberikan dukungan akademis dan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan desa wisata.

Manfaat pengembangan desa wisata yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kwedenkembar mencakup peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja baru, promosi budaya lokal, pelestarian

lingkungan, dan peningkatan infrastruktur desa. Namun, terdapat tantangan dalam transparansi dan efisiensi penggunaan dana desa yang perlu terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal.

SARAN

1. **Transparansi Pengelolaan Dana Desa:**
 - a. Rutin memberikan laporan penggunaan dana dan capaian pembangunan kepada masyarakat.
 - b. Mengadakan sesi sosialisasi untuk menjelaskan rencana penggunaan dana desa secara detail.
2. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):**
 - a. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi masyarakat mengenai pengelolaan wisata, pelayanan wisatawan, dan pengembangan produk lokal.
 - b. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau profesional dalam bidang pariwisata untuk pelatihan berkualitas.
3. **Sederhanakan Regulasi dan Perizinan:**
 - a. Mendorong penyederhanaan proses perizinan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas wisata di desa.
4. **Koordinasi dan Kerjasama:**
 - a. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha wisata, dan pihak terkait lainnya.
 - b. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan universitas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat serta pengelolaan desa wisata.
5. **Partisipasi Masyarakat:**
 - a. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap implementasi kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada perangkat instansi desa kwedenkembar yang telah memberikan dukungan terhadap pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqshal, O. :, & Phasya, V. S. (n.d.). ABSTRAK STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA.
- Ekonomi, J., Fakultas, S., Dan, E., & Islam, B. (n.d.). SKRIPSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur) Oleh: TYAS ARMA RINDI 1502040116.
- Hasman, R. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN KINOVARO KABUPATEN SIGI.
- Kasus Desa Wisata Jelok, S. (n.d.). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA.
- Kasus, S., Lerep, D., Ungaran Barat, K., & Semarang, K. (n.d.). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG.
- Oleh, D., & Nim, R. (n.d.). SKRIPSI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA CEURIH KOTA BANDA ACEH. 18312240. (n.d.).
- PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Studi Kasus pada Desa, Jatipurno, Wononogiri. (n.d.).
- Pembangunan, M., Mencegah, D., Sosial, K., Desa, S., Kecamatan, R., Kabupaten, P., & Tengah, L. (n.d.). IMPLEMENTATION OF VILLAGE FOUND ALLOCATION POLICIES TO INCREASE DEVELOPMENT AND PREVENT SOCIAL INEQUALITY AGAINST THE COMMUNITY (Study Of Villages In Villages Of Pujut Sub District, Central Lombok District).
- Pengembangan desa wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. (n.d.).
- PENGEMBANGAN DESA WISATA TAMAN KALIANYAR MUMBUL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA KALIANYAR. (n.d.).

- Pengembangan, S., Desa, W., Berkelanjutan Sukaris, Y., Kurniawan, A., & Kurniawan, M. D. (n.d.).
Copyright© Creative Commons Attribution 4.0 International License.
<https://doi.org/10.30587/manajerial.v10i1.4751>
- Pengertian Penelitian Hingga Contoh Penelitian Kuantitatif - Gramedia Literasi. (n.d.).
- Royyan Ramly, A., & Mursyida, J. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN POTENSI DESA (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya) (Vol. 1).
- SALINAN Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).
- Sampel (statistika) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.).
- Satria, O. :, & Tumbel, M. (n.d.). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN 1.
- Setiawan, D., Gabriel Jostenz, T., & Djoko Andreas Novalino, R. (n.d.). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa dalam IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN POTENSI WISATA GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH (STUDI PADA KECAMATAN DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG) POLICY IMPLEMENTATION OF VILLAGE OWNED ENTERPRISE IN IMPROVING POTENTIAL TOURISM TO REALIZE REGIONAL ECONOMIC RESILIENCE (STUDY IN DENDANG DISTRICT, EAST BELITUNG REGENCY, BANGKA BELITUNG PROVINCE).
- Sugiarti, R., Aliyah, I., & Yudana, G. (n.d.). PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA DI KABUPATEN NGAWI.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., Iswara, B., Studi, P., Informasi, S., Bali, S., Raya, J., & No, P. (n.d.). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. In Indonesian Journal of Information Systems (IJIS (Vol. 1, Issue 2). <https://www.google.com>
- UU Nomor 32 Tahun 2004. (n.d.).